

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN AGAMA DI TENGAH PLURALISME BUDAYA

Oleh: Khayan

ABSTRACT

In the context of pluralistic Indonesia, religious education has to play an important role in cultivating the students with inclusive paradigm that more contextual, tolerance, respect to others, and able to live together. Accordingly, the exclusive paradigm has to be replaced by the new one, because the former tends to think in rigid, intolerance and dichotomous way. Therefore, learning process should be led to implant ethic dan morality. Religious knowledge should be directed to be functional in daily life. As such, it is needed a religious education in the light of multicultural perspective.

Key words: pendidikan agama, paradigma inklusif, pendidikan multikultural.

I. Pendahuluan

Belakangan ini, agama cenderung diartikan sebagaian orang sebagai sebuah nama yang terkesan menakutkan dan cemas. Agama—di tangan para pemeluknya belakangan ini—sering tampil dengan wajah kekerasan dan seolalah kehilangan wajah ramahnya. Demikian tulisan sebuah pamlet diskusi buku *Kala Agama Jadi Bencana* karya Charles Kimbahll.¹ Potret itu dipertegas lagi dengan kasus terorisme, bom bunuh diri, konflik antaragama, bunuh diri massal atas nama agama yang semakin mengentalkan citra agama yang begitu keras.

Kemudian kita pun bertanya-tanya ada apa dengan agama? Apakah agama mengandung unsur-unsur melegitimasi kekerasan, bahkan teror? Apakah agama sebagai sumber problem atau sumber solusi? Bagaimana mengenali terjadinya pembusukan di tubuh agama? Apa yang masih tersisa dari agama di tengah pergaulan antarmasyarakat.

¹Charles Kimbahll, *Kala Agama Jadi Bencana*, cetatan I, Bandung: Mizan, 2004), hal. 6.

Melihat sejarah Indonesia yang di dalamnya seringkali muncul fenomena kekerasan/konflik yang berbasis SARA (baca: suku, agama, ras dan golongan), termasuk kasus terorisme akhir-akhir ini, agakny menarik perhatian kita untuk berpikir ulang tentang peran agama, lebih khusus pendidikan agama dalam mewarnai kehidupan masyarakat. Seperti peristiwa konflik etnis, konflik antarumat beragama, konflik kepentingan antarkelompok/golongan dan sebagainya. Selain konflik SARA tersebut, yang tidak kalah memprihatinkan adalah fenomena deviasi/dekadensi moral dan etika bangsa seperti KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan Narkoba, seks bebas, kriminalitas dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sedang sakit. Bukan sakit dalam arti fisik seperti HIV, tetapi sakit dalam arti psikis/moral seperti korupsi, kriminalitas, kemaksiatan dsb.

Melihat kenyataan tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi para agamawan, cendekiawan, termasuk peran pendidikan agama dalam membangun masyarakat yang pluralis ini menjadi toleran, rukun dan demokratis menuju masyarakat Madani (berperadaban). Di sini peran pendidikan agama sangat dibutuhkan dan tidak terelakkan. Pendidikan agama, baik agama itu sendiri maupun kemasyarakatan tetap memiliki nilai strategis dalam menciptakan *blue printe* (cetak biru) bagi pengembangan masyarakat (*social engineering*) ke arah yang lebih baik, damai, toleran, demokratis dan sejahtera sebagai masyarakat yang sehat. Di mana ciri masyarakat yang sehat adalah sebuah masyarakat yang walaupun berbeda-beda namun mampu hidup bekerjasama dan rukun.²

Dalam realitas Indonesia yang multi SARA di atas, peran pendidikan agama tetap signifikan dan strategis karena pendidikan agama bisa berperan secara lebih dini di sekolah-sekolah di mana generasi muda mendapat pewarisan (internalisasi) nilai-nilai luhur dari generasi tua atau ajaran agamanya sehingga nilai-nilai itu akan memberikan bekal pengetahuan/prinsip-prinsip dalam menjalani masa depannya.

Melihat fenomena kekerasan/konflik berbasis SARA yang masih seringkali muncul di tengah masyarakat, termasuk penyimpangan moral, tentu saja harus dipikir ulang tentang paradigma pendidikan agama dalam perannya untuk menciptakan keberagaman masyarakat yang religius.

Selain pendidikan agama, tidak kalah penting adalah betapa perlu memperhatikan kualitas pendidikan nasional. Dunia pendidikan nasional masih

² Erich Fromm, *Masyarakat yang Sehat*, (terj.), cetakan. I (Jakarta: Yayasan Obor, 1977), hal. 6.

memerlukan perhatian ekstra, sebab fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sekaligus SDM kita ternyata masih rendah dan tertinggal apalagi kalau dibanding dengan negara-negara lain. Menurut laporan yang dibuat oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC, 2001) Indonesia berada pada peringkat ke 12 dari 12 negara Asia dalam hal mutu pendidikan. Sementara Filipina peringkat ke-9, Malaysia ke-7, India ke-5, Singapura ke-2. Studi lainnya juga dilakukan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP, 2003) tentang *Human Development Index* (HDI) secara langsung menunjukkan rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Di sini Indonesia menempati urutan ke-112 dari 174 negara. Sementara negara-negara tetangga menempati peringkat yang lebih baik seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan lainnya.³

Kenyataan-kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana kualitas pendidikan nasional kita saat ini? Sudah tepatkah paradigma pendidikan agama, metode, kurikulum, anggaran yang proporsional, fasilitas, SDM dan sejenisnya. Tulisan ini dengan segala keterbatasannya berusaha untuk mengurangi benang kusut persoalan tersebut sambil mencari solusinya.

II. Landasan Ideal dan Konstitusional

Secara konstitusional, sesungguhnya pendidikan agama memiliki kedudukan yang kuat, yakni merujuk pada: (1) Dasar Negara Pancasila, terutama sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29 tentang HAM dan hak beragama; (3) Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pertama, sila pertama dari Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dukungan sila-sila lainnya menunjukkan bahwa faktor ketuhanan (*transenden*) memiliki kedudukan tinggi sebagai landasan bagi sila-sila lainnya. Artinya apapun aktivitas kita baik dalam konteks kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan harus dilandasi oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila-sila dalam Pancasila merupakan sari pati yang digali para *founding fathers* bangsa ini dari ajaran nenek moyang sebagai landasan untuk menciptakan sebuah Negara dan sebagai *common platform* dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, Undang-Undang Dasar 28 E ayat 1 UUD 45: *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,*

³ Ki Supriyoko, *Remang-Remang Masa Depan Pendidikan Nasional*, Media Indonesia, edisi 10 . hal.

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian Pasal 29 UUD 45: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Tampaknya semua rakyat Indonesia telah menyepakati isi dua pasal UUD 45 tersebut. Kalau sudah sepakat berarti telah ada *common platform* atau konsensus bagaimana kita sebagai bangsa atau warga negara harus berhubungan dan bekerja sama baik dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsensus yang merupakan produk UUD tersebut hendaknya menjiwai dan diterjemahkan dalam konteks Undang-Undang atau peraturan yang mempunyai kekuatan hukum di bawahnya.

Ketiga, Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal 12 ayat 1: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pasal tersebut yang secara spesifik memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan. Dengan asas legalitas tersebut, semua pihak terutama lembaga pendidikan baik negeri atau swasta harus mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut dan tidak ada alasan untuk menghindarinya. Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut konsekuensinya tentu mempunyai kekuatan hukum dan daya paksa kepada setiap warganya untuk mentaati dan melaksanakan aturan-aturan tersebut, tidak hanya pada tingkat konsep tetapi juga di lapangan.

Sebenarnya, di samping landasan konstitusional tersebut, yang tak kalah penting adalah kenyataan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang religius. Indonesia juga dikenal bukan Negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Artinya adalah nilai-nilai agama tetap penting, sangat mewarnai perilaku dan alam pemikiran masyarakat Indonesia meskipun negara bukan berdasar agama tertentu sehingga nilai-nilai agama memiliki kedudukan yang istimewa di benak bangsa Indonesia. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius sehingga peran agama (pendidikan agama) menjadi hal yang tak terelakkan.

Dalam hal filosofi pendidikan Indonesia, para perintis pendidikan bangsa, teristimewa Ki Hadjar Dewantara, merasa perlu untuk menandakan bahwa pendidikan harus berpedoman pada "kebudayaan Timur yang luhur." Seperti pembentukan *karakter* atau sikap dasar moral dan budi pekerti ditambah

semangat perjuangan menjadi bagian utama.⁴ Dengan kata lain, boleh saja secara metodologis mengadopsi dari Barat, tetapi filosofi dasar harus tetap berdasarkan pada kebudayaan Timur, karena berbeda nilai-nilai dengan Bangsa lain.

III. Urgensi Pendidikan Agama: Moralitas Bangsa

Dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari aspek keagamaan yang memang menjadi bagian dari sifat manusia. Bahwa manusia di samping bersifat jasmani, juga ruhani-spiritual. Jadi kehidupan keagamaan merupakan refleksi dari sifat ruhani-spiritual manusia. Jadi, faktor agama merupakan bagian integral pada diri manusia, terlepas apakah pemeluk agama itu taat atau tidak.

Namun demikian, masalah keagamaan ini pada kenyataannya mengandung paradoks. Dalam arti bahwa kadang masalah agama bisa merekatkan hubungan antar manusia, tetapi ia juga bisa meretakkan hubungan antar manusia karena perbedaan (pemahaman) agamanya, bahkan tidak hanya antar agama, tetapi juga internal agama. Konflik keagamaan tersebut begitu nyata menghiasi sejarah kemanusiaan seperti kasus perang salib, konflik Islam-Hindu di India, konflik antar sekte Sunni-Syiah di Pakistan, konflik Ambon, terorisme dsb.

Problem-problem keagamaan dan moralitas masyarakat begitu kompleks, terutama akar-akar kekerasan religius sehingga harus ditelusuri. Charles Kimbahl⁵ pakar sejarah dan perbandingan (Yahudi-Kristen-Islam), berusaha menelusuri dan memetakan problem/konflik berbasis keagamaan tersebut. Dengan peta analisisnya, pengarang tersebut berhasil menjelaskan fenomena kekerasan religius dewasa ini. Sebagai jalan keluarnya, Kimbahl menghimbau kita agar kembali ke agama autentik. Yakni, modus keberagaman yang tidak sekedar setia dengan doktrin skriptural yang statis, tetapi sebuah iman yang hidup dan menghidupi kemanusiaan universal.

Para pemikir keagamaan berusaha meramu formula yang tepat bagaimana mengurangi konflik berbasis agama tersebut, tidak hanya Islam, tetapi juga Kristen, Hindu, Budha, Yahudi dsb. Sehingga memunculkan ide toleransi, kerukunan, pluralisme, dan sebagainya sebagai upaya untuk mencegah/mengurangi konflik yang bersifat keagamaan yang kadang begitu dahsyat dan berdarah-darah. Upaya menciptakan kehidupan yang plural, namun tetap rukun, damai dan toleran menjadi penting.

⁴Romo Mangun Wijaya, *Saya Ingin Membayar Hutang Kepada Rakyat*, cetakan I, Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 21.

Terlepas dari paradoks tersebut, jelas bahwa hanya agama-lah yang senantiasa menjaga penegakan moralitas iman dan tingkah laku yang luhur bagi umatnya. Ketika telah terjadi internalisasi nilai-nilai agama kepada hati sanubari dan merasuk di dalamnya, maka ia akan menjadi pegangan dan pedoman kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sosial bisa dilihat bahwa kelompok keagamaanlah yang senantiasa menjaga kehidupan masyarakat sampai kehidupan kenegaraan agar tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai agama dan tidak menyimpang darinya.

Jadi fungsi agama sebagai sang penjaga moral/etika masyarakat yang adiluhung inilah yang harus senantiasa dipertahankan dan dipelihara dengan baik sehingga perilaku warga masyarakat tetap dalam koridor moralitas dan iman yang benar. Di sinilah pendidikan agama sebagai media pewarisan nilai-nilai agama menjadi penting dan bermakna bagi manusia dan kemanusiaan serta tidak bisa dihilangkan begitu saja. Hal itu sesuai pendapat Christopher J Lukas (1984) yang mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya terkait dengan aspek *transfer of knowledge* (pengalihan pengetahuan), tetapi juga terkait dengan aspek yang lebih luas, yakni aspek perubahan nilai dan pandangan hidup. Dengan demikian, melalui pendidikanlah diharapkan dapat terjadi perubahan secara mendasar pada aspek moralitas, budaya, kesejahteraan dan sebagainya.⁶

IV. Dari Paradigma Eksklusif ke Inklusif

Keragaman budaya dan agama bangsa ini harus disikapi secara arif dan bijaksana. Perbedaan merupakan hal yang lumrah dan keniscayaan sejarah serta tidak bisa dihindari. Termasuk pemahaman terhadap ajaran agama. Kebenaran mutlak memang ada dalam agama, tetapi tidak bisa memutlakkan/memaksakan kepada orang lain. Pemaksaan kebenaran terhadap pihak lain tentunya akan menimbulkan konflik dengan pihak lain. Oleh karena itu, benar pernyataan Mohammad Sobary⁷ dalam *Spiritual Baru: Agama dan Aspirasi* yang menyatakan bahwa:

Sudah pasti bahwa ada kebenaran mutlak dalam agama. Siapa meragukan ini mungkin ateis. Bila dia mengaku seorang pemeluk agama juga, dia tentu bukan pemeluk yang

⁵ Charles Kimbahl, *Kala Agama*, hal. 32.

⁶ Ngainun Naim, *Krisis Moralitas dan Tanggung-Jawab Dunia Pendidikan* dalam MPA, edisi Juli, Surabaya: 2004, hal. 4.

⁷ Mohammad Sobary, *Spiritual Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, cetakan I (Yogyakarta: Dian Iterfide, 1994), hal. 34.

baik. Dia pendeknya bukan orang yang saleh. Tetapi dalam komunikasi antar budaya, mungkin kita tak bisa memutlakkan kebenaran itu sebab begitu kebenaran mutlak tadi diserahkan Tuhan ke tangan kita untuk menata kehidupan, segera jadi ragu adakah kita untuk menata kehidupan, segera jadi ragu adakah kita telah mengoperasikan kebenaran tadi dengan benar.

Dalam konteks Indonesia, unsur keagamaan begitu kental dalam mewarnai kehidupan sosial-politik. Unsur keagamaan kadang bisa menimbulkan konflik yang tak kalah dahsyatnya di antara kelompok masyarakat. Di sinilah faktor keagamaan mengandung paradoks. Di satu sisi agama bisa menimbulkan energi perekat antarmanusia, tetapi di sisi lain, bisa menimbulkan perpecahan di antara golongan masyarakat.

Boleh saja orang berbeda agama, tetapi janganlah sampai bermusuhan dan menumpahkan darah. Dari pemikiran itulah muncul gagasan tentang paradigma eksklusif dan inklusif. Yang dimaksud paradigma adalah cara pandang atau cara pikir dalam melihat sesuatu sebagai piranti dalam ilmu filsafat.⁸

Pertama, eksklusif adalah sebuah pemahaman keagamaan yang ketat dan kaku. Ia memahami dan memandang orang lain dengan cara yang hitam-putih, mukmin-kafir, halal-haram dan sejenisnya secara ketat dan fanatisme buta. Begitu juga dalam kehidupan sosial-politik, golongan ini kurang bisa berhubungan dan bekerja sama dengan kelompok lain. Mereka mudah menyalahkan atau mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan golongannya. Dengan pemahaman yang *rigid* (kaku) ini tentu saja akan mudah menimbulkan konflik sosial antarkelompok masyarakat yang berbeda-beda. Dalam konteks Negara Kesatuan RI, tentu bisa menimbulkan konflik disintegrasi nasional yang mengancam stabilitas sosial-politik dan keamanan.

Kedua, inklusif adalah suatu pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap suatu ajaran agama. Pemahaman ini tetap melihat bahwa dalam suatu agama ada kebenaran mutlak, namun demikian ia tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Ia mampu memegang nilai-nilai kebenaran agamanya, namun juga mampu bekerjasama dengan orang/umat lain secara toleran dan harmonis, tanpa melanggar ajaran keimanan, tanpa kehilangan jati diri dan identitas kelompoknya. Ia mampu hidup dengan harmonis dalam internal kelompoknya, namun juga bisa hidup berdampingan dan harmonis dengan kelompok yang berbeda. Di sini yang dipentingkan adalah suasana harmonis dan kondusif bagi kehidupan bersama secara damai dan toleran.

⁸Hardono Hadi, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, cetakan I (Kanisius, Yogyakarta, 1994), hal. 35.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural ini, tentu saja sikap hidup yang inklusif sangat diperlukan dalam hidup bersama. Sementara sikap eksklusif harus di jauhi karena akan menimbulkan prasangka, permusuhan dan disintegrasi. Jadi pemahaman keagamaan termasuk pendidikan agama, harus ditekankan pada sikap inklusivitas. Artinya, kita boleh berbeda pemahaman dan keyakinan agama, namun tetap bisa hidup rukun dan damai. Sikap yang serba kaku dan mudah menyalahkan orang lain akan mengganggu keharmonisan hidup bersama baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sikap hidup yang toleran (inklusif) seperti itu juga digambarkan dalam Al-Qu'an surat al-Kafirun dan Piagam Madinah yang dirancang Nabi Muhammad SAW bersama dengan suku-suku lain di kota Madinah pada zamannya. Piagam Madinah itu mengajarkan bahwa perbedaan dalam hal agama, suku, budaya dan politik bukanlah sesuatu yang salah dan merupakan hal yang lumrah, namun jangan sampai mengganggu kerukunan dan persatuan masyarakat. Perbedaan (plural) harus dimaknai secara bijak dan tepat agar kedamaian, kerjasama sosial, kerukunan masyarakat tetap terwujud dan langgeng.

V. Praksis Pendidikan Agama

Praksis pendidikan agama di sini menyangkut hal-hal teknis mengenai kurikulum dan metode pengajaran, yakni bagaimana proses kegiatan belajar dilaksanakan secara baik dan benar. Termasuk anggaran yang proporsional dalam mengelola pengajaran agama, sehingga upaya untuk mengajarkan pendidikan agama bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam hal pendidikan agama, J. Riberu mengatakan:

Pendidikan agama merupakan sarana utama, dan dengannya nilai-nilai agama diperkenalkan baik kepada individu maupun kepada masyarakat. Di samping itu, pendidikan agama juga menciptakan iklim, suasana, bahkan rangsangan nilai konkret di dalam hidup untuk mengalami atau menghayati nilai-nilai tertentu. Lewat pengajaran dan penghayatan, pendidikan agama berusaha membina mentalitas iman dalam diri para penganut.⁹

Pendidikan agama tidak hanya berbentuk pengajaran agama atau pengalihan pengetahuan tentang agama. Pengalihan pengetahuan agama bisa

⁹ J. Riberu, *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Kanisius 2001), hal. 23.

menghasilkan pengetahuan dan ilmu dalam diri orang yang diajar, tetapi pengetahuan ini belum sesuai dengan pengetahuan tersebut. Bahkan pengalihan pengetahuan agama seringkali berbentuk pengalihan rumus-rumus doktrin dan kaidah-kaidah susila. Oleh karena itu, pengajaran agama menghasilkan pengetahuan hafalan yang melekat di bibir dan hanya mewarnai kulit, tetapi tidak mampu mempengaruhi orang yang mempelajarinya.

Untuk menghindari hal itu, lebih lanjut J. Riberu menyarankan pendidikan agama yang autentik, selain menyajikan bahan-bahan pengetahuan, juga mengusahakan pengalaman dan penghayatan nilai-nilai di dalam situasi dan lingkungan hidup sehari-hari. Dalam penghayatan, orang dibina untuk mengalami secara sadar suatu nilai (*Werterlebnis*). Dari pengalaman yang sadar, orang akan diajak untuk menghargai nilai yang dijumpai (*Wertschatzung*). Karena yakin akan harga nilai tersebut, orang mulai menerima nilai bagi dirinya sendiri (*Wetbejaung*), dan dalam tiap situasi hidup orang akan mengalami sikap positif terhadap nilai yang telah diterimanya itu (*Wertentscheidung*) dan mencoba mengejawantahkan nilai tersebut (*Werbestatigung*).¹⁰

Melihat fakta sosial yang berisikan banyak konflik bernuansa agama, maka pendidikan agama harus direvisi dari konsep indoktrinasi menjadi relevansi. Artinya adalah pendidikan agama harus dikembangkan bukan hanya indoktrinasi berupa ajaran surga-neraka, baik-buruk, halal-haram, mukmin-kafir, tetapi juga relevansinya yakni berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga akan bisa dihayati dan di amalkan. Pendidikan agama harus mengajarkan pengetahuan menjadi pengetahuan yang fungsional, artinya pengetahuan yang membantu orang untuk menanggapi, menilai dan menemukan sikap dalam hidup. Oleh karena itu, pengajaran agama sebaiknya bertitik tolak dari dan di kaitkan kepada situasi hidup konkret sehari-hari, seperti bagaimana berpikir dan bertindak baik untuk diri sendiri maupun orang lain, berhubungan dengan orang lain, bermasyarakat, toleransi, hidup dalam masyarakat plural dan sejenisnya.

Dari segi metode pengajaran, hendaknya hubungan guru dan murid bersifat dialogis-komunikatif. Guru tidak dipandang sebagai satu-satunya sumber belajar, murid bukan sebagai obyek pengajaran. Namun guru dan murid sama-sama sebagai subyek belajar sehingga suasana belajar di kelas akan dinamis dan hidup.¹¹ Konsep Pendidikan yang dikembangkan oleh Paulo Freire menarik

¹⁰ J. Riberu, *Penididikan: Kegelisahan*, hal. 51.

¹¹ Paulo Freire dan Ira Shor, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*, terjemahan, cetakan I (Yogyakarta: Lkis, 2001), hal. 34.

dipakai dalam mengembangkan pemikiran anak dalam pemecahan masalah. Di sini pendidikan bisa dimaknai sebagai pemberdayaan manusia agar mandiri dan kreatif.

Kemudian dari segi *out put*, menurut H.A.R. Tilaar dalam *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* menulis: lulusan pendidikan yang diidealkan adalah *education and civilized human being* yakni, manusia terpelajar/berpengetahuan dan berbudaya. Manusia macam itu hanya dapat dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan yang berakar dalam kebudayaan.¹² Jadi, pengajaran pendidikan agama tidak hanya dipahami sebagai transfer pengetahuan saja, tetapi juga penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ajaran agama pada gilirannya mencapai relevansinya dengan alam nyata, bukan hanya alam akhirat/ghaib.

Selain faktor kurikulum dan metode, menurut temuan Ahmad Ramadhan dalam penelitiannya (1998) adalah faktor anggaran yang memadai, kualitas SDM, kurangnya fasilitas bagi pengembangan pendidikan agama. Lanjutnya, selama ini masih ada kesan marginalisasi pendidikan agama di tengah pendidikan pengetahuan umum. Oleh karena itu, harus segera ada pembenahan dan solusi permasalahan tersebut demi perbaikan kualitas pendidikan agama kita. Contoh kongkret adalah anggaran lembaga pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sungguh timpang. Pertanyaannya adalah bagaimana harus meningkatkan mutu dan bersaing, kalau modal dasarnya atau anggaran saja tidak seimbang. Dalam jangka panjang, hendaknya persoalan anggaran di dua lembaga itu baik di tingkat dasar sampai perguruan tinggi harus diseimbangkan kalau kualitas pendidikan di semua lembaga pendidikan ingin ditingkatkan. Persoalan anggaran tersebut menjadi uneg-uneg atau gerundelan di tengah masyarakat. Pendeknya, segala persoalan yang menyelimuti pendidikan agama tersebut harus diselesaikan di mana pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita.¹³

Berangkat dari fakta tersebut, Abdurrahman Mas'ud menggagas format pendidikan non *dikotomi*. Yakni sebuah pemikiran yang tidak membedakan antara jenis pendidikan yang satu dengan pendidikan yang lain. Sehingga tidak ada diskriminasi perlakuan baik secara kebijakan maupun prakteknya di lapangan. Gagasan ini agaknya menarik untuk dikembangkan bagi perbaikan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.¹⁴

¹² H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 92.

¹³ Ahmad Ramadhan, *The Place of Islamic Education in the Nation Education System in Indonesia*, Tesis S2, Leiden University, 1998, hal. 67.

¹⁴ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomi: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal. 35.

VI. Pembaharuan dalam Pendidikan Islam

Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat vital. Bukanlah suatu kebetulan jika ayat pertama al-Qur'an, surat al-'Alaq memulai dengan perintah membaca, *iqra'*. Di samping itu, pesan-pesan Al-Qur'an dalam hubungannya dengan pendidikanpun dapat dijumpai dalam berbagai ayat dan surat dengan aneka ungkapan pernyataan, pertanyaan dan kisah. Lebih khusus lagi, kata *ilm* dan derivasinya digunakan paling dominan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan perhatian Islam yang luar biasa terhadap pendidikan.¹⁵

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah pendidikan. Hal ini karena pendidikan adalah sebuah penamaan modal manusia untuk masa depan.¹⁶ Masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan dalam kaitannya dengan masa depan suatu bangsa. Atau dapat dikatakan bahwa corak pendidikan masa kini merupakan miniatur bangsa di masa depan.¹⁷

Masalah pendidikan dalam suatu tahapan filosofis berhubungan dengan pemahaman secara ontologis tentang manusia. Persoalan manusia harus terjawab secara filosofis, mengingat tema sentral dan orientasi dasar pendidikan adalah ingin mengantarkan manusia. Dalam menemukan pandangan kemanusiaan yang demikian dapat dilakukan kajian dengan pendekatan filosofis-keilmuan.¹⁸

Peradaban Islam sejak awal juga menunjukkan prestasi yang sangat berarti dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Pada permulaan penyiaran Islam, Nabi Muhammad menggunakan apa yang disebut sebagai pendekatan pendidikan, bukan pemaksaan, dalam mengajarkan agama Islam pada lingkaran khusus di rumah Arqam. Tingginya perhatian Nabi Muhammad terhadap pendidikan juga terlihat ketika ia memutuskan pembebasan bagi tahanan perang non-muslim dengan syarat yang bersangkutan mengajarkan tulis baca kepada Muslim yang buta huruf. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid yang pada dasarnya berfungsi sebagai tempat ibadah, justru menjadi tempat pendidikan yang menonjol pada dua abad pertama seiarah peradaban Islam. Lembaga terakhir yang kemudian diakui sarjana sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam

¹⁵Husni Rahim, "Pendidikan Islam di Indonesia, Keluar dari Eksklusivisme" dalam H.A.R.Tilaar, *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru, 70 tahun* (Jakarta : Grassindo, 2002), hal. 422-423.

¹⁶Nurcholis Madjid, " Kata Pengantar" dalam H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru, 70 Tahun*, (Jakarta : Grassindo, 2002), hal. 179.

¹⁷Junaidi, "MenatapMasa Depan Dunia Pendidikan Kita" dalam Singgalang, Padang ,1998, hal. 4.

¹⁸Syamsul Arifin dkk., *Islam Pluralisme Budaya dan Politik* (Jakarta: Sipress, 1994) hal. 45.

memberikan sumbangan penting bagi perkembangan tradisi *college* dan universitas modern di Barat.¹⁹

Namun dunia pendidikan di Indonesia sesungguhnya masih punya banyak “pekerjaan rumah” dan persoalan mendasar. Sebagai ilustrasi, dari segi pendidikan, bangsa Indonesia saat ini masih terbelakang dalam lingkup Asia, bahkan dalam lingkup yang lebih kecil lagi, Asia Tenggara. Malaysia, misalnya, menganggap Indonesia kini tidak memenuhi syarat (*unqualified*), meskipun Malaysia pernah di tahun 1970-an “hutang budi” pada Indonesia dalam hal mengimpor banyak guru dari Indonesia.²⁰

Ada banyak faktor yang menyebabkan tertinggalnya perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. *Pertama*, karena kebijakan politik kolonial Belanda yang menempatkan pendidikan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi dan dihancurkan. *Kedua*, sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pendidikan Barat, yang berorientasi kepada kepentingan ideologi sekuler yang berpotensi mendangkalkan agama dari segala aspeknya.²¹

Selain faktor di atas, menurut Nurcholish Madjid, ada persoalan-persoalan lain yang menyebabkan pendidikan di Indonesia ketinggalan zaman. *Pertama*, salah satunya adalah ketidakmampuan dalam menguasai bahasa Inggris. Nurcholish Madjid tidak bermaksud “membunuh” eksistensi bahasa Indonesia, akan tetapi untuk saat ini bahasa Inggris sangat instrumental untuk meningkatkan mutu pendidikan sebab 90% buku terbit setiap hari dalam bahasa Inggris. *Kedua*, pendidikan di Indonesia masih didekati secara nativistik, yaitu suatu orientasi yang hanya bertumpu kepada bangsa sendiri, bahwa baik dan benar hanya datang dari bangsa sendiri. Dengan demikian, pendidikan seharusnya menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan universal (*personality development*) seperti masyarakat madani, *civil*, *civilized* atau berperadaban. Pada akhirnya akan muncul penghargaan terhadap sesama manusia, egalitarianisme, toleran dan non diskriminatif.²²

Ketiga, kurangnya kesadaran yang penuh dalam hal etos penelitian. Menurut Nurcholish Madjid orang-orang Amerika dan Barat pada umumnya tetap yang paling baik. Hampir semua temuan dilakukan oleh orang-orang Barat. Oleh sebab itu, etos penelitian sangat terkait dengan tekanan kuat pada aspek

¹⁹Husni Rahim, “Pendidikan Islam”, hal. 65.

²⁰Nurcholish Madjid, “Kata Pengantar”, hal. xiii.

²¹Agus Salim Sitompul, *Menyatu Dengan Umat Menyatu dengan Bangsa, Pemikiran Keislaman HMI (1947-1997)* (Jakarta: Logos, 2002), hal. 62.

²²Nurcholish Madjid, “Kata Pengantar”, hal. xxiii-xxxi.

pengembangan pribadi.

Keempat, hal terkait dan sangat penting dibicarakan berkenaan dengan pendidikan adalah kebebasan. Dalam hal ini Nurcholish Madjid “kagum” dan sekaligus “kecewa” atas apa yang dikatakan oleh seorang penulis buku Amerika keturunan India, Kishore Mahbubani. Mahbubani mengatakan, “*Can Asia Think?*” Kesimpulannya adalah bahwa orang Asia tidak berpikir. Mengapa? Menurut Nurcholish Madjid jawabannya sangat sederhana:

“Orang-orang Asia itu tidak berani berbeda. Mereka lebih menekankan kerukunan dan keharmonisan. Karena tidak terbiasa dengan perbedaan, maka ketika muncul perbedaan sedikit saja sudah menimbulkan stigma yang luar biasa dan ditanggapi dengan permusuhan dan reaksi yang sangat keras. Ketidaksanggupan untuk berbeda inilah kemudian melahirkan berbagai tindak kekerasan. Mahbubani berpendapat bahwa ketidakmampuan orang Asia berpikir bukan soal gen atau ras tetapi karena soal budaya”.²³

Kelima, menonjolnya pendidikan verbalisme di Indonesia. Sudah lama pendidikan di Indonesia berwatak verbalistik melulu, berisi omongan, teori-teori abstrak, namun sedikit sekali bersinggungan dengan realitas atau kenyataan sesungguhnya. Oleh sebab itu, pendidikan harus mendorong dan mengupayakan rasa *curiosity* terhadap alam. Berkaitan dengan ini, program-program pendidikan berupa *outbound training* harus segera diperbanyak dan dikembangkan.

Keenam, pluralitas keagamaan harus diperkenalkan bahwa bangsa Indonesia majemuk dari segi keyakinan dan ajaran agama. Di Indonesia terdapat multi agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Masing-masing ajaran agama itu mempunyai ukuran tingkah laku sendiri dan setiap umat beragama harus menjadi toleran dan memiliki rasa penghargaan terhadap orang lain.

Ketujuh, persoalan penting lainnya adalah pendidikan terkait dengan soal penghargaan terhadap peran dan posisi guru. Masyarakat yang maju selalu menempatkan guru dalam posisi yang sangat terhormat.

Rendah dan minimnya ilmu yang dimiliki orang-orang Islam atau kemiskinan intelektual, membawa konsekuensi rendahnya kemampuan umat Islam memberi respon pada tantangan zaman secara kreatif dan bermanfaat, yang mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat.²⁴

²³*Ibid.*, hal. xxvi.

²⁴Lihat Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 45.

Apabila orang-orang Islam memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan benar, serta menyadari bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan referensi tertinggi umat Islam, kesalahpahaman tentang Islam tidak perlu terjadi. Al-Qur'an dalam salah satu ayatnya mensitir, bahwa agama Islam memiliki gagasan yang revolusioner, seperti terungkap dalam surat Ar-Ra'du ayat 11, "Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".²⁵

Keyakinan diri dan kemampuan menghadapi masa depan sangat tergantung pada bagaimana cara berpikir. Jika Islam mengajarkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka, maka interpretasi yang paling sesuai dengan dalam perubahan nasib sangat tergantung pada perubahan cara berpikir. Sebab cara berpikir merupakan salah satu hal yang paling substantif dalam diri manusia.²⁶

Kasus ini mengindikasikan pendidikan adalah suatu keniscayaan. Umat Islam dituntut untuk memiliki kesuburan dan kematangan intelektual, agar mampu merespon setiap tantangan zaman, melakukan sesuatu pembaruan guna memenuhi kebutuhan manusia kontemporer. Kalau pendidikan sebagai suatu keniscayaan, maka pendidikan akan membuahkan manusia terdidik yang memiliki kesuburan intelektual sehingga ia mempunyai kelebihan dari yang lain.

Untuk itulah, dalam pandangan Anhar Gonggong, pendidikan harus bersenyawa dengan budaya dan politik. Persenyawaan dalam visi, perspektif dan kehidupan bangsa Indonesia ke depan adalah dibutuhkan agar setiap manusia Indonesia merasakan lebih sejahtera, lebih prestise hidup dalam kesatuan Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia yang terpuruk di segala bidang tidak lepas dari terpisahnya kebudayaan dengan unsur lain, termasuk pendidikan dan politik. Untuk itu, tegas Anhar Gonggong, persenyawaan harus dilakukan dalam tiga bentuk. *Pertama*, membersihkan birokrasi dan memperbaiki atau membuat sistem aturan sesuai nilai. Perombakan struktur kelembagaan dan penetapan kembali tugas masing-masing individu menjadi sangat urgen dan vital. *Kedua*, merekonstruksi eksistensi personalia dan birokrasi. *Ketiga*, pendidikan hanya dipahami sebagai proses pembelajaran, bukan pembebasan dan etika. Bahkan ada semacam paham bahwa pendidikan merupakan proses

²⁵ *Ibid.*, hal. 370.

²⁶ *Ibid.*, hal. 29.

ekonomi, sehingga terjadi apa yang disebut kegagalan dalam dunia pendidikan.²⁷

Paling tidak, dalam menatap reformasi masa depan dunia pendidikan membutuhkan pandangan integral dalam perspektif filosofis dan antisipasi kebutuhan. *Pertama*, pendidikan merupakan suatu instrumen strategis pengembangan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Potensi inilah yang menjadi acuan agar manusia secara esensial dan eksistensial menjadi makhluk religius yang mencerminkan karakteristik spiritual kemanusiaan.

Keadaan potensi tersebut, bukanlah sesuatu yang bersifat telah jadi (*state of being*), tetapi merupakan keadaan natural (*state of nature*) yang perlu diproses (*state of become*) dalam konteks budaya secara makro atau mikro melalui pendidikan. Dengan menyadari dimensi antropologis ini, maka pendidikan mempunyai kerangka nilai dasar (*fundamental values*) kedudukan yang tidak hanya komplementatif tetapi filosofis. *Kedua*, kenyataan lain yang perlu diperhatikan adalah tentang realitas sosiologis manusia, meminjam istilah Peter L. Beger, yang selalu dengan proses dialektika fundamental dalam konteks kemasyarakatan. *Ketiga*, perubahan yang berkelanjutan di masa depan. Sudah merupakan suatu *sunnatullah* bahwa kehidupan ini akan berkembang menuju masa depan secara evolutif dan revolutif, karena merupakan keharusan sejarah (*historical necessity*).²⁸

VII. Penutup

Menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, tidak bisa tidak, memang harus dimulai dari pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh semua kelompok masyarakat. Pendidikan yang berkualitas baik secara filosofis-teoritis maupun teknis-praktis akan meningkatkan kualitas yang utuh bagi pendidikan nasional kita. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, keduanya harus bersatu-padu dalam memajukan dan mencerdaskan anak bangsa menuju Indonesia baru yang demokratis, adil dan sejahtera. Dalam kehidupan keluarga besar Indonesia yang plural ini, maka penting adanya pendidikan agama yang memperhatikan pendidikan multi-kultural, yakni pendidikan yang mengajarkan tentang pentingnya memaknai perbedaan dalam SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) secara bijak dan positif sehingga masih tetap dalam koridor persatuan dan dalam Negara Kesatuan R.I.

²⁷Anhar Gonggong, "Sudah Saatnya Pendidikan, Budaya dan Bersenyawa" dalam *Kompas*, No. 185, Tahun ke-37, 2002, hal. 9.

²⁸Junaidi, "Menatap Masa", hal. 4.

Begitu sentralnya kedudukan ilmu dalam pembangunan sebuah peradaban, maka menurut hemat penulis, umat Islam yang sedang membangun sebuah peradaban harus mengusahakan secara maksimal alih ilmu pengetahuan dari bangsa yang menguasainya meskipun mereka bukan Muslim. Demikian pula pencarian ilmu itu tidak terbatas pada ilmu agama Islam saja, tetapi juga termasuk ilmu-ilmu sekuler yang bermanfaat, sebab kedua ilmu itu sama cepatnya mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia. Dengan pendidikan agama yang tepat dan benar, dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan negeri ini. Sehingga dengan demikian, makna agama sebagai *rahmatan lil'alamin* bisa mencapai maknanya di seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Freire, Paulo dkk., *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*, cetakan I, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Fromm, Erich, , *Masyarakat yang Sehat*, cetakan. Jakarta: Yayasan Obor, 1997.
- Anhar Gonggong, "Sudah Saatnya Pendidikan, Budaya dan Bersenyawa", Kompas No. 185, Tahun ke-37, 2002.
- Hadi, Hardono, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, cetakan I, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Junaidi, "Menatap Masa Depan Dunia Pendidikan Kita", Singgalang, Padang, 1998.
- Kimbahll, Charles, *Kala Agama Jadi Bencana*, cetakan. I, Bandung: Mizan, 2004.
- Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____, "Kata Pengantar" dalam *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru, 70 Tahun H.A.R. Tilaar*, Grassindo, Jakarta, 2002.
- Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2004
- Ngainun Na'im, *Krisis Moralitas dan Tanggung- Jawab Dunia Pendidikan*, MPA. edisi Juli, Surabaya, 2004.
- Husni Rahim, "Pendidikan Islam di Indonesia, Keluar dari Eksklusivisme dalam Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru, 70 tahun H.A.R. Tilaar, Jakarta: Grassindo, 2002.
- Ahmad Ramadhan, *The Place of Islamic Education in the Nation Education System in Indonesia*, Tesis S2, Leiden University, 1998.

- J. Riberu, *Penididikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Agus Salim Sitompul, *Menyatu Dengan Umat Menyatu dengan Bangsa, Pemikiran Keislaman HMI (1947-1997)*, Jakarta: Logos, 2002.
- Mohammad Sobar, *Spiritual Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, cetakan I, Yogyakarta: Dian Iterfide, 1994.
- Ki Supriyoko, *Remang-Remang Masa Depan Pendidikan Nasional*, edisi 10 Agustus 2004, Jakarta: Media Indonesia, 2004.
- HAR. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Syamsul Arifin, dkk. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, Jakarta: Sipress, 1994.
- Romo Mangun Wijaya, *Saya Ingin Membayar Hutang Kepada Rakyat*, cetakan I, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

